

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Review* Penelitian Sejenis

Review penelitian sejenis yaitu mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya dilakukan orang lain, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini mencakup permasalahan yang diteliti, siapa peneliti tersebut, dimana dan kapan penelitian tersebut dilakukan, metode apa yang digunakan, dan apa hasil penelitian/kesimpulannya. Selain itu, hasil dari penelitian terdahulu dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Maka dari itu, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Wicaksono & Mukti (2024) dengan judul “Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum”. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas alur komunikasi organisasi di lingkungan KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh kejelasan distribusi pesan dari tingkat pusat hingga ke tingkat pelaksana di bawahnya. Penggunaan media komunikasi digital dan pertemuan koordinasi intensif menjadi instrumen utama dalam meminimalisir kesalahan interpretasi aturan pemilu yang sering berubah. Selain itu, penelitian ini

menekankan bahwa hambatan komunikasi teknis dapat diatasi melalui penguatan pola komunikasi formal yang didukung oleh hubungan informal yang harmonis di antara staf penyelenggara guna menjaga ritme kerja selama tahapan pemilu yang padat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nawaf & Sikumbang (2024) dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Pola Komunikasi Organisasi Mahasiswa dan Implementasi Kerja di HMJ UIN Sumatera Utara”. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi dalam organisasi mahasiswa serta pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang efektif melalui keterbukaan, kejelasan informasi, dan frekuensi komunikasi yang intensitasnya terjaga sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi program kerja. Faktor gaya komunikasi kepemimpinan yang bertindak sebagai penghubung antar anggota terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja sekaligus meminimalisir kesenjangan serta kecemburuan sosial antar pemegang jabatan. Temuan ini menegaskan bahwa terdapat korelasi positif antara pola komunikasi yang sehat dengan tingkat efisiensi manajemen organisasi kemahasiswaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ardiyansa & Putri (2025) dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Pola Komunikasi Organisasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo Pada Pilkada 2024”. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2025 ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola

komunikasi organisasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi fenomenologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh Panwaslu Kecamatan Mulyorejo sangat bergantung kepada situasi dan konteks ruang komunikasi yang sedang berlangsung. Organisasi ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi (iklim komunikasi) dan penggunaan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. Selain itu, efektivitas koordinasi dalam organisasi ini dicapai melalui keselarasan antara struktur formal dengan budaya organisasi yang ada. Penggunaan pola komunikasi yang adaptif tersebut terbukti mampu membantu anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan secara terkoordinasi dan efektif guna meminimalisir kendala teknis selama tahapan Pilkada berlangsung.

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sejenis

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Wicaksono & Mukti (2024)	Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di	Metode kualitatif dengan jenis studi deskriptif	Fokus pada efektivitas komunikasi dalam lingkup lembaga penyelenggara pemilu serta	Fokus pada subjek penelitian yang berada pada lingkup KPU secara umum

		Komisi Pemilihan Umum		pentingnya alur distribusi pesan dalam memitigasi kesalahan teknis selama tahapan pemilihan berlangsung.	(professional/ pemerintahan), sedangkan peneliti berfokus pada dinamika KPUM FISIP UNPAS (mahasiswa) serta variable pesan verbal dan non- verbal)
2.	Azmi Nawaf (2024)	Pola Komunikasi Organisasi Mahasiswa dan Implementasi Kerja di HMJ UIN Sumatra Utara	Metode kualitatif dengan jenis deskriptif	Memiliki kemiripan variabel yaitu implementasi kerja/kinerja dalam lingkup organisasi mahasiswa (HMJ).	Objek penelitian adalah organisasi rutin (HMJ), sedangkan penelitian ini pada lembaga ad-hoc (KPUM)

3.	Ardiyansa & Putri, 2025	Pola Komunikasi Organisasi Panwaslu Kecamatan Mulyorejo Pada Pilkada 2024	Metode kualitatif dengan jenis studi fenomenologi	Meneliti tentang pola komunikasi organisasi, penggunaan pesan verbal dan non- verbal, serta dinamika koordinasi internal pada lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (<i>ad-hoc</i>).	Fokus pada objek penelitian tingkat instansi kecamatan dibandingkan tingkat mahasiswa, serta fokus masalah jurnal pada iklim pengawasan umum sementara peneliti pada kendala teknis data akademik dan penundaan jadwal Pemira Legislatif
----	-------------------------------	---	---	---	---

Sumber: Data Olahan Peneliti (2026)

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Komunikasi

2.2.1.1 Definisi Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin "*communicatio*" yang bersumber dari kata "*communis*" yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah satu makna. Jadi, jika dua orang terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikan, yakni baik si penerima maupun si pengirim sepaham mengenai suatu pesan tertentu (Effendy, 2002).

Menurut *Hoveland, Janis, dan Kelley*, komunikasi didefinisikan sebagai "*the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify, the behavior of other individuals*" (komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya).

Menurut (Mulyana, 2018) Komunikasi adalah proses dimana seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak

Dalam rangka menarik kesimpulan dari tiga definisi yang disajikan di atas, komunikasi merupakan suatu proses dimana individu atau kelompok menggunakan kata-kata atau simbol verbal untuk mentransmisikan informasi

dengan tujuan mempengaruhi atau memodifikasi perilaku individu lainnya. Kunci dari proses ini adalah kesamaan makna atau pemahaman antara pengirim dan penerima pesan.

Komunikasi dianggap sebagai elemen fundamental yang digunakan oleh individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat dalam upaya mereka untuk menjalin hubungan dengan lingkungan dan individu lainnya, baik melalui komunikasi lisan maupun verbal.

2.2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi

Salah satu ahli yang memberikan pandangan tentang unsur-unsur komunikasi adalah Dedy Mulyana. Menurut beliau, komunikasi terdiri dari beberapa unsur utama yang saling terkait untuk memastikan pesan dapat disampaikan dan diterima dengan baik. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai unsur-unsur komunikasi menurut (Mulyana, 2018):

- 1) Pengirim (*Sender*): Pengirim merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menginisiasi pesan. Peran pengirim sangat penting karena ia harus memastikan pesan yang disampaikan jelas, relevan, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Selain itu, pengirim juga perlu mempertimbangkan karakteristik audiens yang menjadi penerima pesan.
- 2) Pesan (*Message*): Pesan merupakan isi atau konten yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berupa informasi, ide, gagasan, atau emosi yang hendak dikomunikasikan. Pengirim harus memilih kata-

kata atau simbol-simbol yang tepat agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh penerima.

- 3) Penerima (*Receiver*): Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Proses interpretasi ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai, dan latar belakang budaya penerima. Penting bagi pengirim untuk memahami karakteristik dan konteks penerima agar pesan dapat diterima dengan maksimal.
- 4) Kanal (*Channel*): Kanal merupakan media atau sarana yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim kepada penerima. Jenis kanal dapat bervariasi, mulai dari komunikasi lisan, tulisan, hingga elektronik seperti email atau media sosial. Pemilihan kanal komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik audiens, kompleksitas pesan, dan keefektifan dalam mencapai tujuan komunikasi.
- 5) Umpan Balik (*Feedback*): Umpan balik adalah respons atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Umpan balik ini penting untuk menilai keberhasilan komunikasi dan memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar. Pengirim dapat menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan dan meningkatkan kualitas komunikasi di masa mendatang.

2.2.2 Komunikasi Organisasi

Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian pesan, informasi, ide, maupun instruksi yang dilakukan oleh

individu atau kelompok di dalam suatu organisasi dengan tujuan menciptakan saling pengertian serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. Komunikasi organisasi menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas organisasi karena seluruh proses kerja, koordinasi, dan pengambilan keputusan membutuhkan komunikasi yang efektif. (Effendy, 2017)

Effendy menjelaskan bahwa komunikasi organisasi tidak hanya berlangsung antara pimpinan dan bawahan, tetapi juga terjadi antaranggota organisasi dalam berbagai bentuk interaksi, baik secara formal maupun informal. Komunikasi formal biasanya dilakukan melalui rapat, surat resmi, instruksi kerja, maupun kebijakan organisasi yang disampaikan berdasarkan struktur organisasi. Sementara itu, komunikasi informal terjadi secara alami melalui interaksi sehari-hari antaranggota organisasi, seperti percakapan santai, diskusi pribadi, maupun komunikasi interpersonal di lingkungan kerja. (Effendy, 2017)

Dalam suatu organisasi, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, membangun koordinasi kerja, serta menjaga hubungan antaranggota organisasi. Komunikasi yang berjalan dengan baik akan menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan efektivitas kerja, dan membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik internal, rendahnya motivasi kerja, bahkan menghambat jalannya organisasi. (Effendy, 2017)

Selain itu, komunikasi organisasi juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku anggota organisasi agar dapat bekerja sesuai dengan

aturan, nilai, dan tujuan organisasi. Melalui komunikasi, pimpinan dapat memberikan arahan, motivasi, serta pengawasan terhadap anggota organisasi sehingga tercipta keteraturan dan koordinasi kerja yang baik. Oleh karena itu, komunikasi organisasi tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan sosial dan menciptakan integrasi dalam organisasi. (Effendy, 2017)

2.2.2.1 Unsur-Unsur Komunikasi Organisasi

Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi organisasi terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan mendukung keberhasilan proses komunikasi. Unsur-unsur tersebut meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek komunikasi. (Effendy, 2017)

1) Komunikator

Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain dalam organisasi. Komunikator dapat berupa pimpinan, manajer, staf, maupun anggota organisasi lainnya. Dalam proses komunikasi organisasi, komunikator memiliki peran penting karena keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami. Selain itu, komunikator juga harus memiliki kredibilitas dan kemampuan menyesuaikan cara penyampaian pesan sesuai kondisi penerima pesan. (Effendy, 2017)

2) Pesan

Pesan merupakan isi informasi, ide, instruksi, atau gagasan yang disampaikan dalam proses komunikasi organisasi. Pesan dapat berbentuk lisan, tulisan,

simbol, maupun bahasa nonverbal. Dalam organisasi, pesan biasanya berkaitan dengan kebijakan, pembagian tugas, target kerja, maupun evaluasi pekerjaan. Pesan yang baik harus disampaikan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif. (Effendy, 2017)

3) Media atau Saluran Komunikasi

Media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media komunikasi dalam organisasi dapat berupa rapat, surat resmi, telepon, email, memo, maupun aplikasi komunikasi digital. Pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan jenis dan tujuan pesan yang akan disampaikan. Penggunaan media yang tepat akan membantu mempercepat penyampaian informasi dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman. (Effendy, 2017)

4) Komunikan

Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Dalam organisasi, komunikan dapat berupa individu, kelompok, maupun seluruh anggota organisasi. Pemahaman komunikan terhadap pesan yang diterima sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Oleh karena itu, penyampaian pesan harus mempertimbangkan latar belakang, tingkat pemahaman, serta kondisi psikologis penerima pesan. (Effendy, 2017)

5) Efek atau Dampak

Efek merupakan hasil atau pengaruh yang timbul setelah proses komunikasi berlangsung. Efek komunikasi dapat berupa perubahan sikap, perilaku,

pemahaman, maupun tindakan anggota organisasi. Efek komunikasi menjadi indikator keberhasilan komunikasi organisasi. Apabila pesan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh komunikan, maka komunikasi dapat dikatakan berhasil. (Effendy, 2017)

2.2.2.2 Fungsi Komunikasi Organisasi

Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung keberlangsungan dan efektivitas organisasi, yaitu fungsi informatif, persuasif, regulatif, dan integratif. (Effendy, 2017)

1) Fungsi Informatif

Fungsi informatif berarti komunikasi digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada seluruh anggota organisasi. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan organisasi, pembagian tugas, peraturan, maupun perkembangan organisasi. Melalui fungsi informatif, anggota organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami tujuan organisasi secara jelas. (Effendy, 2017)

2) Fungsi Persuasif

Fungsi persuasif berarti komunikasi digunakan untuk mempengaruhi dan mendorong anggota organisasi agar bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam fungsi ini, pimpinan tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberikan motivasi dan dorongan kepada anggota organisasi agar memiliki semangat kerja yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. (Effendy, 2017)

3) Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif berarti komunikasi berfungsi sebagai alat pengendali dan pengatur perilaku anggota organisasi. Melalui komunikasi, pimpinan dapat menyampaikan aturan, prosedur kerja, dan kebijakan organisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Fungsi ini bertujuan menciptakan keteraturan dan disiplin kerja dalam organisasi. (Effendy, 2017)

4) Fungsi Integratif

Fungsi integratif berarti komunikasi digunakan untuk menciptakan persatuan dan kerja sama antaranggota organisasi. Dalam organisasi terdapat individu dengan latar belakang dan karakter yang berbeda-beda, sehingga komunikasi diperlukan untuk menyatukan perbedaan tersebut agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung. (Effendy, 2017)

2.2.2.3 Tujuan Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi memiliki tujuan utama untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui proses penyampaian informasi yang efektif. Menurut Onong Uchjana Effendy, tujuan komunikasi organisasi meliputi beberapa hal berikut. (Effendy, 2017)

1) Menciptakan Kesamaan Pemahaman

Komunikasi organisasi bertujuan menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman antara pimpinan dan anggota organisasi mengenai tugas, kebijakan, dan tujuan organisasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pekerjaan.

2) Memperlancar Penyampaian Informasi

Komunikasi organisasi bertujuan memastikan bahwa informasi dapat disampaikan secara cepat, jelas, dan tepat kepada seluruh anggota organisasi agar proses kerja dapat berjalan dengan baik.

3) Meningkatkan Kerja Sama Antaranggota Organisasi

Komunikasi organisasi bertujuan membangun hubungan kerja sama yang baik antaranggota organisasi sehingga tercipta koordinasi kerja yang efektif dalam mencapai tujuan bersama.

4) Mengurangi Kesalahpahaman dan Konflik

Komunikasi yang baik dapat membantu meminimalkan terjadinya miskomunikasi, perbedaan persepsi, maupun konflik internal dalam organisasi.

5) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Komunikasi organisasi bertujuan membantu organisasi menjalankan aktivitas secara efektif dan efisien melalui koordinasi kerja yang baik dan penyampaian informasi yang terarah.

6) Membangun Hubungan Kerja yang Harmonis

Komunikasi organisasi juga bertujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan dan anggota organisasi maupun antaranggota organisasi sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

2.2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPUM)

2.2.1.1 Definisi KPUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Ramlan Surbakti (2010), pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk menyalurkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan wakil dan pemimpin secara sah. Dalam konteks tersebut, KPU berfungsi sebagai penyelenggara yang menjamin proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Dalam lingkungan kampus, fungsi KPU direpresentasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) atau lembaga sejenis yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira). KPUM berperan memastikan proses pemilihan berlangsung demokratis, transparan, dan adil, sehingga menjadi miniatur praktik demokrasi dalam skala perguruan tinggi. KPUM merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang memiliki peran sentral sebagai penyelenggara tunggal dalam agenda Pemilihan Umum Raya (Pemira) di tingkat fakultas. Secara konseptual, KPUM bukan hanya sekadar lembaga yang menjalankan tugas administratif saja, melainkan sebuah ruang di mana para anggota di dalamnya terus melakukan koordinasi dan pertukaran informasi setiap harinya. Sebagai sebuah organisasi yang bersifat independen, KPUM memiliki

struktur divisi yang jelas, yang mana hal ini secara otomatis menuntut adanya alur komunikasi yang tertata agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dalam setiap tahapannya.

Keberadaan KPUM dalam riset ini difokuskan pada bagaimana para anggotanya membangun interaksi internal untuk menyikapi setiap tahapan pemilihan yang dinamis. Mengingat beban kerja penyelenggara pemilu sering kali dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan dan instruksi yang menuntut ketepatan waktu, maka pola komunikasi yang terbentuk di antara anggota menjadi kunci utama. Dengan demikian, KPUM di sini dilihat sebagai sebuah sistem komunikasi kelompok yang bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh anggota. Hal ini penting agar pesan atau kebijakan yang dikeluarkan organisasi dapat bersifat satu suara, konsisten, dan meminimalisir adanya kebingungan informasi di dalam internal organisasi itu sendiri.

2.2.1.2 Tugas dan Wewenang

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang independen, KPUM dibekali dengan seperangkat otoritas khusus untuk memastikan seluruh proses demokrasi di tingkat mahasiswa berjalan sesuai aturan. Tugas dan wewenang ini bukan sekadar landasan administratif, melainkan representasi dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara kolektif oleh seluruh anggota. Setiap substansi wewenang yang diemban menuntut adanya koordinasi yang matang dan pembagian kerja yang presisi agar setiap tahapan Pemira dapat terlaksana secara akuntabel dan transparan. Adapun rincian tugas dan

wewenang yang menjadi acuan operasional KPUM FISIP Unpas adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan, memimpin, dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemira sebagaimana di tentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b) Membentuk, memberi arahan, dan mengkoordinasikan organisasi pelaksanaan Pemira ditingkat Fakultas dan Jurusan.
- c) Menyusun dan menetapkan tat cara dan tata laksana Pemira sebagai penjabaran teknis peraturan oerundang-undangan.
- d) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tata cara dan tatalaisana Pemira kepada seluruh mahasiswa FISIP UNPAS.
- e) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemira.
- f) Mengajukan rencana anggaran kepada DPM.

2.2.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPUM

Dalam menjalankan fungsinya, eksistensi KPUM sebagai sebuah lembaga penyelenggara didukung penuh oleh perangkat organisasi yang memiliki fungsi serta spesialisasi kerja masing-masing. Merujuk pada amanat yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pemira, struktur internal KPUM disusun sedemikian rupa yang terdiri dari unsur pimpinan dan divisi-divisi kerja. Pembagian ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata, melainkan sebuah upaya untuk membangun alur koordinasi yang sistematis melalui batasan tanggung jawab pada setiap posisi yang tersedia.

Sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22, alat kelengkapan tersebut dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu Badan Pengurus Harian (BPH) dan divisi-divisi teknis. Penjabaran mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1) Badan Pengurus Harian (BPH)

Badan Pengurus Harian (BPH) merupakan elemen pimpinan kolektif yang berfungsi sebagai penggerak utama sekaligus pusat kendali organisasi dalam mengambil berbagai kebijakan strategis demi menjamin stabilitas internal lembaga. Sebagai struktur inti, BPH memiliki otoritas untuk mengatur tata kelola organisasi agar tetap berjalan secara harmonis dan sesuai dengan visi-misi yang telah dicanangkan sejak awal periode kepengurusan. Merujuk pada ketentuan tugas yang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pemira, uraian tanggung jawab dan wewenang pimpinan adalah sebagai berikut:

a) Ketua Umum

Sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi KPUM, ketua memegang peran sentral sebagai representasi utama yang mewakili lembaga dalam berbagai urusan. Tanggung jawab ini mencakup ruang lingkup internal, yaitu dalam mengoordinasikan seluruh anggota, maupun ruang lingkup eksternal saat berinteraksi dengan pihak birokrasi fakultas, peserta pemilu dari partai mahasiswa, hingga organisasi mahasiswa lainnya. Dalam keseharian organisasi, ketua memiliki otoritas untuk memimpin rapat-rapat paripurna serta memantau secara langsung seluruh jalannya agenda kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemira tetap berjalan pada jalur yang

benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, ketua juga berperan sebagai pengambil keputusan akhir yang tetap harus mengutamakan musyawarah dan aspirasi bersama, demi menjaga netralitas serta integritas lembaga selama masa pemilihan berlangsung.

b) Sekertaris Umum

Sekretaris memegang tanggung jawab dalam mengelola seluruh administrasi dan urusan rumah tangga internal KPUM. Peran ini sangat penting untuk menjamin keteraturan birokrasi, terutama dalam hal pengelolaan surat-menyurat serta pengarsipan data di setiap tahapan kegiatan agar semua dokumen lembaga tersimpan secara rapi. Namun, fungsinya tidak terbatas pada urusan berkas semata, sekretaris juga bertindak sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan setiap elemen dalam organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi maupun instruksi pimpinan dapat tersebar secara merata, sekaligus menjaga agar komunikasi antar bagian tetap selaras tanpa ada informasi yang terputus di tengah jalan. Keberadaan fungsi ini menjadi kunci utama yang menentukan apakah alur kerja kolektif dalam KPUM bisa berjalan sinkron dan tetap berada pada rencana yang telah disepakati bersama.

c) Bendahara Umum

Bendahara Umum memiliki tugas utama untuk mengelola seluruh aspek finansial dan kebutuhan logistik organisasi. Bendahara bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan anggaran, mengawasi arus masuk dan keluar uang, serta memastikan setiap pengeluaran terdokumentasi secara transparan. Peran ini menjadi tulang punggung bagi kelancaran operasional KPUM, karena

setiap tahapan pemilihan tentu membutuhkan dukungan dana dan sarana prasarana yang memadai. Selain fokus pada urusan keuangan, bendahara juga harus menjalin koordinasi yang intens dengan sekretaris agar setiap pengadaan barang atau kebutuhan logistik tetap sinkron dengan laporan administratif. Ketelitian dalam posisi ini sangat menentukan stabilitas organisasi, terutama dalam menjaga akuntabilitas keuangan lembaga selama seluruh proses Pemira berlangsung.

2) Divisi

Di luar jajaran pimpinan inti, operasional KPUM didukung oleh beberapa divisi teknis dengan spesialisasi tugas yang berbeda. Divisi-divisi ini berfungsi sebagai unit pelaksana yang bertugas mengimplementasikan kebijakan strategis pimpinan ke dalam teknis pengerjaan di lapangan. Secara fungsional, setiap divisi bekerja secara terintegrasi untuk mengawal seluruh rangkaian Pemira, mulai dari tahap persiapan hingga proses rekapitulasi suara. Keberadaan mereka menjadi elemen krusial yang menjamin setiap aspek teknis pemilihan dapat dikelola secara profesional, terukur, dan sistematis. Untuk memastikan seluruh rangkaian Pemira berjalan secara terukur dan sistematis, pembagian tugas pada tiap unit kerja tersebut adalah sebagai berikut :

a) Divisi Kesekretariatan

Divisi Kesekretariatan bertindak sebagai pusat pengelolaan data yang menangani mulai dari registrasi Partai Mahasiswa hingga proses verifikasi bagi para calon kandidat di tingkat DPM, BEM, maupun HMJ. Tidak hanya berfokus pada pendaftaran kandidat, divisi ini juga mengoordinasikan

pendataan pemilih melalui mekanisme sensus untuk menjamin akurasi daftar pemilih tetap. Mengingat fungsinya yang bersentuhan langsung dengan validitas berkas dan data peserta, seluruh aktivitas divisi ini dilakukan di bawah pengawasan dan tanggung jawab langsung ketua KPUM guna memastikan keteraturan administrasi sepanjang tahapan berlangsung.

b) Divisi Pendidikan dan Informasi

Divisi ini memegang peranan kunci dalam mengelola edukasi publik serta menjembatani arus informasi antara organisasi dengan seluruh mahasiswa. Fokus kerjanya diarahkan pada upaya membangun pemahaman pemilih mengenai sistem kepartaian dan teknis pelaksanaan Pemira melalui berbagai rangkaian sosialisasi. Selain itu, peninfo memiliki wewenang penuh dalam memproduksi serta mendistribusikan informasi resmi terkait seluruh aktivitas KPUM di berbagai media. Namun, mengingat setiap pernyataan yang keluar membawa nama lembaga, otoritas publikasi tersebut tetap dijalankan berdasarkan kesepakatan internal dan berada di bawah koordinasi langsung ketua KPUM guna menjaga konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik.

c) Divisi Penelitian dan Pengembangan

Divisi ini memegang peran dalam mengawal aspek riset dan pengembangan sistem pemilihan secara menyeluruh. Tugas tersebut dijalankan dengan melaksanakan program sensus pemilih guna menjamin keakuratan data mahasiswa yang akan berpartisipasi. Selain fokus pada pendataan, litbang juga berperan aktif dalam mengkaji konsep sistem kepartaian serta mekanisme

Pemira guna memastikan aturan yang berlaku tetap relevan. Untuk menunjang kajian tersebut, divisi ini menyelenggarakan agenda pertemuan atau forum diskusi guna membahas lebih dalam mengenai penguatan sistem pemilihan. Mengingat fungsinya yang berkaitan langsung dengan pengembangan organisasi, seluruh pelaksanaan tugas divisi ini berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab langsung ketua KPUM.

d) Divisi Hukum

Divisi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemilihan tetap berpijak pada aturan main yang sah. Fokus utamanya berkaitan dengan penilaian legalitas para peserta, mulai dari validasi status pemilihan hingga pengecekan kelayakan para calon kandidat yang maju di tingkat DPM, BEM, maupun HMJ. Selain itu, divisi hukum juga berperan dalam menelaah setiap potensi pelanggaran yang terjadi dalam sistem kepartaian maupun selama proses pemilihan berlangsung. Dalam menangani berbagai persoalan hukum yang muncul, divisi ini bekerja sama secara intensif dengan Panwaslu untuk memastikan adanya penyelesaian yang adil. Mengingat fungsinya yang sangat berkaitan dengan integritas kompetisi, seluruh aktivitas divisi ini dikoordinasikan secara langsung di bawah tanggung jawab Ketua KPUM.

2.2.4 Pemilihan Umum Raya (Pemira)

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung melalui partisipasi warga negara. Pemilu menjadi mekanisme utama

dalam pembentukan pemerintahan yang sah dan representatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Esensi demokrasi dalam pemilu nasional tersebut kemudian direplikasi ke dalam tata kelola organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk pembelajaran politik bagi kaum intelektual. Pemilihan Umum Raya atau PEMIRA merupakan mekanisme kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara berkala setiap satu periode sekali. Sebagai sebuah sistem demokrasi di lingkungan kampus, Pemira menjadi wadah resmi untuk memilih fungsionaris organisasi kemahasiswaan yang terbagi ke dalam dua ranah utama, yaitu Pemira Legislatif dan Pemira Eksekutif. Pada ranah legislatif, proses ini ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), sementara pada ranah eksekutif, Pemira diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Gubernur dan Wakil Gubernur Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Dalam pelaksanaannya, metode pemungutan suara dalam Pemira bersifat adaptif terhadap situasi dan kondisi yang ada, di mana pemilihan dapat dilangsungkan melalui sistem *E-Voting* maupun secara luring (konvensional). Seluruh proses ini dijalankan melalui rangkaian tahapan penyelenggaraan yang sistematis dan terintegrasi, dimulai dari pendaftaran serta penetapan peserta dan pemilih, pencalonan kandidat, penetapan jumlah kursi, hingga masa kampanye.

Puncak dari Pemira ditandai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang kemudian disusul dengan penetapan hasil resmi. Seluruh rangkaian ini diakhiri secara konstitusional melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan oleh para pemimpin terpilih sebagai bentuk legitimasi atas mandat yang diberikan oleh mahasiswa.

2.2.2.1 Jenis-Jenis Pemira

Pelaksanaan Pemira di FISIP Unpas terbagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi lembaga yang akan diisi. Perbedaan jenis pemilihan ini menjadi dasar bagi anggota KPUM dalam mengatur pola komunikasi dan koordinasi dengan para peserta, baik dari unsur partai maupun pasangan calon.

a) Pemira Legislatif

Pemira Legislatif merupakan mekanisme pemilihan yang diadakan untuk mengisi susunan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP Unpas. Agenda ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memilih perwakilan yang nantinya menjalankan tugas legislasi serta pengawasan organisasi selama satu periode ke depan. Fokus utamanya adalah membentuk komposisi lembaga dewan yang akan memegang peran dalam mengawal aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.

Sistem pemilihan ini memiliki aturan khusus di mana pihak yang berkompetisi harus melalui jalur partai mahasiswa yang telah terdaftar resmi. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai, yang kemudian dikonversi menjadi jatah kursi di DPM. Hal tersebut menyebabkan

fokus pemilihan legislatif lebih tertuju pada pergerakan organisasi politik mahasiswa dalam mengamankan posisi di dewan.

b) Pemira Eksekutif

Pemira Eksekutif merupakan agenda pemilihan yang diselenggarakan untuk menentukan pemegang jabatan pimpinan di lembaga eksekutif mahasiswa. Proses ini bertujuan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat fakultas, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Berbeda dengan pemilihan legislatif, fokus utama dalam Pemira Eksekutif adalah memilih pemimpin yang akan menjalankan roda organisasi dan mengeksekusi program kerja selama satu periode masa jabatan.

Aturan pencalonan mengharuskan setiap pasangan calon yang maju dalam pemilihan ini diusulkan oleh partai mahasiswa atau gabungan partai mahasiswa yang telah memenuhi syarat perolehan kursi tertentu di DPM. Ketentuan mengenai jumlah kursi minimal ini membuat partai mahasiswa perlu membangun koalisi apabila perolehan suaranya belum mencukupi syarat untuk mendaftarkan pasangan calon. Bagi anggota KPUM, adanya kerja sama antarpolisi tersebut memerlukan pola komunikasi yang lebih intensif, terutama saat melakukan verifikasi dokumen dukungan dan memastikan keabsahan koalisi yang terbentuk.

2.2.5 Partai Politik Mahasiswa

Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan pilar utama yang berfungsi sebagai jembatan antara warga negara dan pemerintah. Menurut Budiardjo (2015) dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara yang berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik, sosialisasi politik, serta rekrutmen politik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Representasi peran strategis partai politik di tingkat negara tersebut kemudian diadaptasi ke dalam lingkup organisasi kemahasiswaan. Partai politik mahasiswa merupakan organisasi independen yang berfungsi sebagai wadah artikulasi serta agregasi kepentingan mahasiswa dalam dinamika demokrasi kampus. Di lingkungan Universitas Pasundan, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemira), partai politik berperan dalam mengusung calon perwakilan serta menjadi sarana pendidikan politik bagi konstituennya guna mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas.

Dalam perspektif Sahid Gatara (2016), partai politik berfungsi sebagai penghubung antara struktur kekuasaan dengan konstituen melalui penyaluran aspirasi mahasiswa menjadi program kerja nyata. Selain itu, partai politik menjalankan fungsi sosialisasi untuk membangun kesadaran berdemokrasi

anggota di setiap tahapan Pemira. Fungsi rekrutmen juga dijalankan guna menyeleksi kader yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, sekaligus mengelola perbedaan kepentingan agar persaingan kekuasaan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku di FISIP Universitas Pasundan.

Adapun partai politik mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta pada periode ini meliputi:

- 1) PASFOR (Partai *Solidarity For Revolutioner*)
- 2) PARMA (Partai Republik Mahasiswa)
- 3) PINUS
- 4) Jong Pasundan
- 5) KOMPAS (Konsolidasi Mahasiswa Pasundan)
- 6) Jendela Kesatuan

2.2.6 Mahasiswa

2.2.4.1 Definisi Mahasiswa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa tergolong dari dua kata yaitu “maha” dan juga “siswa”. Maha mempunyai arti tersendiri seperti sesuatu yang besar dan siswa adalah orang yang sedang-belajar. Jika digabung maka mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.

Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Mahasiswa Adalah manusia yang tercipta untuk selalu berpikir yang saling melengkapi (Siswoyo, 2007)

Dalam dinamika Pemilihan Raya (Pemira), mahasiswa menempati posisi sentral yang unik, yakni sebagai subjek yang dipilih sekaligus sebagai pihak yang memilih. Sebagai pihak yang dipilih, mahasiswa bertransformasi menjadi calon-calon pemimpin dan wakil rakyat yang membawa visi, misi, serta aspirasi konstituennya. Di sisi lain, sebagai pihak yang memilih, mahasiswa memegang kedaulatan penuh untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi melalui hak suara mereka. Posisi ganda inilah yang menyebabkan pola komunikasi dalam Pemira menjadi sangat dinamis, karena pesan yang disampaikan oleh KPUM harus mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa baik sebagai peserta yang berkompetisi maupun sebagai pemilih yang membutuhkan informasi.

Dalam lingkup komunikasi organisasi di kampus, mahasiswa merupakan khalayak aktif (*active audience*) yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Mulyana (2013), individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki ekspektasi besar terhadap keterbukaan informasi dan kualitas pesan yang mereka terima. Hal ini membuat mahasiswa menjadi pengawas alami terhadap setiap narasi yang dilempar oleh lembaga penyelenggara seperti KPUM. Mereka memiliki

kemampuan untuk membedah, merespons, bahkan menolak pola komunikasi yang dianggap tidak transparan atau tidak akuntabel.

2.2.4.2 Ciri-Ciri Mahasiswa

Menurut (Siallagan, 2011) mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu, di antaranya:

- a) Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelektual.
- b) Mempunyai kesempatan di atas diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin Masyarakat ataupun dalam dunia kerja.
- c) Diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi.
- d) Diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas dan profesional.

2.2.4.3 Peranan Mahasiswa

Kehadiran mahasiswa sebagai kelompok intelektual di lingkungan perguruan tinggi menempatkan mereka pada posisi strategis yang membawa tanggung jawab besar dalam mendorong perubahan serta kemajuan, baik dalam lingkup sosial kemasyarakatan maupun dinamika internal organisasi. Sebagai kekuatan pemikir, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tetapi juga diharapkan mampu mengimplementasikan kapasitasnya dalam menjaga stabilitas serta kualitas kinerja di lingkungan tempat mereka bernaung. Mahasiswa dipandang sebagai subjek yang memiliki idealisme tinggi untuk mengevaluasi sekaligus

menyempurnakan sistem yang sedang berjalan. Merujuk pada pemikiran Wibowo (2015), terdapat empat peranan utama yang secara fundamental melekat pada diri mahasiswa, yaitu:

a) Sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Mahasiswa berperan sebagai penggerak yang mampu membawa perubahan positif dalam tata kehidupan sosial. Kapasitas intelektual dan daya kritis yang dimiliki menempatkan mahasiswa sebagai pionir dalam melakukan pembaruan terhadap sistem yang sudah ada menuju ke arah yang lebih baik.

b) Sebagai Pengontrol Sosial (*Social Control*)

Mahasiswa berperan sebagai penyeimbang dan pengawas dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Fungsi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemangku kepentingan tetap berjalan sesuai dengan norma, kebenaran, dan kepentingan orang banyak.

c) Sebagai Penjaga Nilai (*Guardian of Value*)

Mahasiswa berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, integritas, dan objektivitas. Mahasiswa diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tidak luntur oleh kepentingan-kepentingan pragmatis.

d) Sebagai Stok Besi (*Iron Stock*)

Mahasiswa berperan sebagai generasi penerus yang dipersiapkan untuk memegang estafet kepemimpinan di masa depan. Peran ini menuntut mahasiswa untuk senantiasa mengasah kemampuan, keterampilan, dan karakter kepribadian yang tangguh guna melanjutkan keberlangsungan organisasi maupun bangsa.

2.3 Kerangka Teoritis

Teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk merancang dan mengarahkan analisis dalam suatu penelitian. Sebagai kerangka pemikiran, teori memberikan pedoman bagi peneliti dalam memahami, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Proses analisis dalam penelitian tidak terlepas dari peran teori yang digunakan, karena teori menyediakan sudut pandang dan parameter untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain, teori membantu peneliti membangun logika argumentasi yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, pendekatan teori yang digunakan adalah interaksi simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori interaksi simbolik adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Teori ini menekankan pentingnya konsep diri dan persepsi individu. Teori ini menekankan bahwa makna dibangun melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi.

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah “interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol”. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Penganut interaksionisme simbolik

berpandangan, perilaku manusia pada dasarnya adalah produk interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka, jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan, sebagaimana dianut teori behavioristik atau struktural. Alih-alih, perilaku dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. Individu tidak hanya bertindak berdasarkan realitas objektif, tetapi juga terhadap makna subjektif yang mereka konstruksikan melalui proses interaksi.

Teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead terdiri dari tiga komponen utama: pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*). Ketiga elemen ini saling berhubungan dalam menjelaskan bagaimana individu membangun makna melalui interaksi sosial. Interaksi simbolik relevan untuk penelitian ini karena menjelaskan bagaimana anggota KPUM FISIP UNPAS menggunakan simbol-simbol komunikasi, baik *verbal* maupun *non-verbal*, seperti instruksi di grup WhatsApp, penggunaan stiker/emoji, hingga gestur fisik saat rapat koordinasi untuk mengekspresikan peran organisasi mereka. Dengan memahami pola interaksi ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana proses simbolisasi di *internal* organisasi berdampak pada sinkronisasi kerja, profesionalisme anggota, dan keberhasilan penyelenggaraan PEMIRA Legislatif.

Berikut adalah uraian dan gambaran langkah-langkah dalam proses Teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dengan penelitian peneliti:

1) Pikiran (*Mind*)

Menurut George Herbert Mead, pikiran adalah kemampuan unik manusia untuk memahami, merenungkan, dan menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial. Pikiran memungkinkan manusia tidak hanya untuk bereaksi secara instan, tetapi juga untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil tindakan. Ini adalah fungsi mental yang mendasari semua bentuk komunikasi simbolik, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Pikiran mencakup proses internalisasi makna dari simbol-simbol tertentu, baik itu kata-kata, gestur, gambar, atau representasi lainnya, yang kemudian diorganisasi menjadi pemahaman dan tindakan.

Mead menjelaskan bahwa pikiran berkembang melalui interaksi sosial, di mana individu belajar untuk mengenali simbol-simbol yang memiliki makna bersama. Proses ini melibatkan pengambilan perspektif orang lain untuk memahami bagaimana simbol-simbol tersebut akan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Dengan kata lain, pikiran memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap tindakan mereka, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan norma atau harapan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, anggota KPUM FISIP UNPAS menggunakan pikiran mereka untuk memproses dan mengevaluasi berbagai elemen simbolik dalam interaksi organisasi sebelum memutuskan untuk bertindak atau merespons suatu instruksi. Proses ini melibatkan pemahaman

mendalam terhadap pesan yang dihadirkan melalui instruksi formal ketua, informasi di grup WhatsApp, hingga dinamika regulasi PEMIRA Legislatif. Anggota tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menganalisis maksud di balik pesan tersebut serta relevansinya dengan tanggung jawab divisi mereka masing-masing.

Sebagai contoh, ketika seorang anggota menerima data akademik mahasiswa yang akan digunakan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), mereka akan menggunakan pikiran mereka untuk mengaitkan keakuratan data tersebut dengan risiko teknis yang mungkin terjadi di lapangan. Mereka merenungkan apakah data tersebut sudah valid atau justru berpotensi menimbulkan kendala pada jadwal PEMIRA yang telah ditetapkan. Pikiran juga berfungsi untuk mempertimbangkan potensi reaksi dari mahasiswa (konstituen) serta pimpinan fakultas jika terjadi ketidaksinkronan informasi.

Proses ini menunjukkan bahwa pikiran memainkan peran penting dalam menghubungkan simbol-simbol komunikasi organisasi dengan tindakan yang lebih profesional dan terarah. Anggota KPUM memilih pola komunikasi yang relevan tidak hanya untuk menjalankan tugas fungsional, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam koordinasi internal yang lebih solid demi meminimalisir kesalahan teknis. Dengan demikian, pikiran menjadi pusat dari interaksi simbolik, memungkinkan anggota KPUM untuk menggunakan simbol komunikasi sebagai alat untuk membangun sinkronisasi kerja, menyampaikan komitmen organisasi, dan menyukseskan penyelenggaraan PEMIRA Legislatif tahun 2025/2026.

2) Diri (*Self*)

Konsep diri dalam teori interaksi simbolik menjelaskan bagaimana individu membentuk identitas melalui interaksi sosial. George Herbert Mead menyatakan bahwa identitas individu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan pengalaman interaksi sosial. Diri (*self*) terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai, norma, dan ekspektasi sosial yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari.

Mead membagi konsep diri menjadi dua aspek utama, yaitu "*I*" dan "*Me*":

- a) "*I*": Merupakan sisi diri yang spontan, kreatif, dan subjektif. "*I*" adalah respon individu terhadap situasi sosial tanpa dipengaruhi oleh norma atau ekspektasi sosial.
- b) "*Me*": Mewakili sisi diri yang dipengaruhi oleh norma, harapan, dan pandangan masyarakat. "*Me*" adalah refleksi individu tentang bagaimana masyarakat memandang mereka, dan hal ini dibentuk melalui pengalaman interaksi sosial yang berulang.

Dalam konteks penelitian ini, anggota KPUM FISIP UNPAS membentuk identitas organisasi mereka melalui interaksi selama tahapan PEMIRA. Melalui aspek "*I*", anggota dapat secara spontan merespons situasi di lapangan sesuai dengan perasaan atau karakter pribadi mereka. Misalnya, ketika seorang anggota merasa tertekan oleh beban kerja yang berat atau merasa frustrasi karena ketidakvalidan data akademik, mereka

mungkin menunjukkan reaksi spontan dalam komunikasi internal, seperti memberikan pendapat yang kritis atau menunjukkan emosi otentik dalam diskusi kelompok. Sisi "*I*" ini mencerminkan kejujuran individu dalam menghadapi realitas dinamika organisasi.

Namun, aspek "*Me*" juga turut memengaruhi keputusan dan pola komunikasi mereka. Anggota KPUM mempertimbangkan bagaimana tindakan dan ucapan mereka akan dinilai oleh rekan sejawat, pimpinan organisasi, hingga konstituen mahasiswa FISIP UNPAS secara luas. Kesadaran ini mencerminkan internalisasi norma organisasi dan kode etik penyelenggara pemilu, di mana anggota merasa perlu menyesuaikan ekspresi diri mereka dengan ekspektasi profesionalisme yang melekat pada jabatan mereka.

Sebagai contoh, seorang anggota mungkin memilih untuk tetap menggunakan bahasa yang formal dan menjaga sikap tenang saat berkoordinasi mengenai penundaan jadwal PEMIRA, meskipun secara pribadi ia merasa panik. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk menjalankan tugas, tetapi juga untuk membangun citra diri sebagai penyelenggara yang kompeten dan bertanggung jawab di mata publik. Dengan demikian, pola komunikasi yang dipilih tidak hanya menjadi sarana koordinasi, tetapi juga alat untuk membangun identitas diri yang sesuai dengan ekspektasi lembaga.

Proses ini menunjukkan bahwa identitas anggota KPUM dibentuk melalui keseimbangan antara aspek "*I*", yang mencerminkan ekspresi diri yang spontan dan subjektif, dan aspek "*Me*", yang mencerminkan kesadaran terhadap norma dan ekspektasi sosial organisasi. Dalam hal ini, interaksi dalam KPUM berperan sebagai media simbolik yang memungkinkan anggota untuk mengekspresikan karakter pribadi mereka sekaligus beradaptasi dengan aturan main dalam penyelenggaraan PEMIRA Legislatif tahun 2025/2026.

3) Masyarakat (*Society*)

Dalam perspektif teori interaksi simbolik, masyarakat dipandang sebagai hasil dari interaksi dinamis antara individu yang saling bertukar simbol, membentuk norma, nilai, dan budaya bersama. George Herbert Mead menjelaskan bahwa masyarakat adalah produk kolektif dari proses komunikasi yang berkelanjutan, di mana individu berkontribusi pada penciptaan struktur sosial sembari menyesuaikan diri dengan norma dan ekspektasi sosial yang ada.

Masyarakat tidak hanya terbentuk secara fisik melalui pertemuan langsung, tetapi juga secara simbolik melalui sistem birokrasi dan aturan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat organisasi di lingkup KPUM FISIP UNPAS tercipta melalui berbagai bentuk interaksi simbolik, seperti budaya rapat koordinasi, penggunaan regulasi PEMIRA, instruksi formal, hingga pembagian wewenang antardivisi. Anggota KPUM, misalnya, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat organisasi ini

dengan mengikuti pola komunikasi yang dianggap relevan untuk menjaga stabilitas lembaga dan kepercayaan konstituen.

Pola komunikasi dalam KPUM tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis untuk menjalankan tahapan pemilihan, tetapi juga sebagai alat simbolik yang memperkuat keterhubungan anggota dengan struktur lembaga. Ketika anggota mengikuti alur koordinasi atau merespons instruksi pimpinan terkait validasi data akademik, mereka secara tidak langsung menunjukkan partisipasi dalam diskursus atau agenda kerja yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kepatuhan terhadap pola komunikasi menjadi bentuk ekspresi simbolik yang menciptakan rasa memiliki terhadap kesatuan organisasi KPUM.

Masyarakat organisasi KPUM dibangun di atas pemahaman kolektif terhadap simbol-simbol tertentu yang dimaknai bersama, seperti jadwal tahapan, surat keputusan (SK), atau prosedur operasional standar (SOP). Melalui pola komunikasi yang disepakati, anggota dapat menempatkan diri mereka dalam konteks sosial yang lebih luas, menunjukkan solidaritas antardivisi, atau bahkan memengaruhi kebijakan internal yang sedang berkembang. Sebagai contoh, dengan mengomunikasikan kendala teknis secara transparan kepada pimpinan, anggota tidak hanya menunjukkan tanggung jawab pribadi tetapi juga memperkuat kredibilitas simbol lembaga di mata mahasiswa FISIP UNPAS.

Selain itu, validasi dari masyarakat organisasi menjadi bagian penting dari proses interaksi ini. Pengakuan berupa apresiasi rekan kerja,

kelancaran koordinasi, hingga dukungan dari mahasiswa (konstituen) memberikan legitimasi sosial kepada anggota atas kinerja mereka. Validasi ini tidak hanya memberikan kepuasan profesional tetapi juga memperkuat rasa bahwa kontribusi mereka diakui oleh komunitas kampus. Interaksi ini menunjukkan bahwa anggota tidak hanya menjadi pelaksana tugas, tetapi juga kontributor aktif dalam membentuk makna kolektif mengenai integritas PEMIRA.

Dalam lingkup organisasi mahasiswa, masyarakat tidak lagi terikat pada batasan struktural kaku, melainkan meluas ke ruang interaksi yang memungkinkan individu untuk saling berbagi makna secara organisasional. Pola komunikasi dalam KPUM menjadi salah satu bentuk interaksi simbolik yang memungkinkan anggota untuk menjalankan fungsi mereka, berpartisipasi dalam suksesnya demokrasi kampus, dan mendapatkan pengakuan dari komunitas FISIP UNPAS. Dengan demikian, proses interaksi simbolik di KPUM tidak hanya membantu anggota dalam menjalankan tugas, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat organisasi dan konstituen yang lebih luas dalam penyelenggaraan PEMIRA Legislatif tahun 2025/2026.

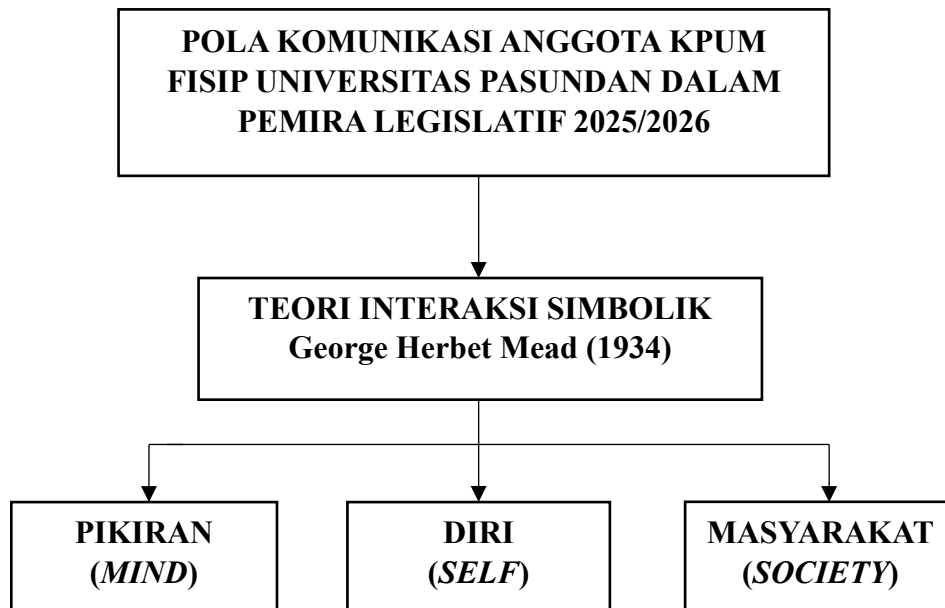
2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer sebagai pisau analisis untuk membedah pola komunikasi internal anggota KPUM FISIP Unpas periode 2025/2026. Dalam perspektif ini, KPUM

dipandang sebagai sebuah ruang sosial di mana para anggotanya tidak hanya bekerja secara mekanis, melainkan terus-menerus melakukan proses pemberian makna terhadap tanggung jawab mereka melalui interaksi sehari-hari. Segala bentuk aturan teknis Pemira Legislatif, instruksi pimpinan, hingga simbol-simbol komunikasi digital di media sosial koordinasi, diposisikan sebagai stimulus yang menuntut interpretasi bersama. Pola komunikasi yang terjalin baik secara formal dalam rapat maupun koordinasi informal menjadi sarana bagi para anggota untuk saling bertukar pikiran dan menyelaraskan persepsi agar tugas penyelenggaraan pemilihan dapat dijalankan secara kolektif.

Kerangka berpikir penelitian ini menekankan bahwa pola komunikasi internal tersebut merupakan hasil dari proses interpretasi yang dilakukan oleh setiap anggota terhadap simbol yang mereka terima. Anggota KPUM secara aktif mengolah pesan dan informasi mengenai tahapan Pemira Legislatif, yang kemudian membentuk cara mereka bersikap dan bertindak satu sama lain. Keberhasilan organisasi dalam menciptakan pemahaman kolektif (*shared meaning*) melalui pola komunikasi yang terbuka dan intensif akan menentukan efektivitas kinerja mereka sebagai penyelenggara. Dengan demikian, penelitian ini berasumsi bahwa kekuatan pola komunikasi internal anggota KPUM dalam menginterpretasikan regulasi pemilihan adalah kunci utama dalam mensukseskan kedaulatan mahasiswa pada Pemira Legislatif di FISIP Unpas.

Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan Peneliti (2026)